



Pemakaman di Jogja Dibuat Tumpuk

JOGJA—Pemakaman di Kota Jogja akan dibuat tumpuk dengan menggabungkan beberapa jenazah. Langkah itu dilakukan karena keterbatasan lahan pemakaman.

Ario Fajar Hidayat, Andreea Yuda Praseno, & Dandi Kusumawati
redaksi@harianjogja.com

► Meski sistem makam tumpuk terbilang baru, regulasi tersebut tidak mendapat penolakan.

► Pemkab Sleman berkomitmen memberi fasilitas kepada warga Sleman terkait dengan lahan pemakaman.

DPRD Kota Jogja kini tengah merancang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemakaman menyusul penemuan kapasitas lahan pemakaman milik Pemkot Jogja. Salah satu regulasi baru yang akan diatur adalah sistem makam tumpuk atau menggabungkan beberapa jenazah dalam satu liang lahat.

Ketua Pansus Raperda Pemakaman DPRD Kota Jogja, Taufiq Setiawan, mengatakan kebijakan ini harus diambil karena keterbatasan lahan di wilayah kota. Meski sistem makam tumpuk terbilang baru, Taufiq memastikan regulasi tersebut tidak menemui penolakan. "Alhamdulillah tidak ada (penolakan), waktu rapat dengar pendapat umum kemarin mayoritas sepakat searah, *Gimana* lagi, karena kebutuhan pemakaman kota semakin sedikit," kata Taufiq, Rabu (20/8).

Selain itu, aturan baru juga mengatur pemberian administrasi serta konsep makam humanis. Area pemakaman akan ditata lebih rapi dengan penanaman rumput agar tidak terkesan menakutkan.

Raperda Pemakaman juga mengatur klasifikasi pemakaman menjadi empat jenis dengan fungsi dan sistem pengelolaan berbeda. *Pertama*, tempat pemakaman umum (TPU) untuk masyarakat umum dan dikelola pemerintah.

► Halaman 10

Pemakaman di Jogja...

Kedua, tempat pemakaman bukan umum (TPBNU) untuk komunitas tertentu atau organisasi keagamaan. *Ketiga*, makam sosial bagi jenazah telantar atau tidak dikenal. *Keempat*, makam keluarga bagi keluarga tertentu sebagai bagian dari identitas kekerabatan.

Raperda ini nantinya hanya berlaku untuk pemakaman yang dikelola Pemkot Jogja. Saat ini terdapat empat lokasi pemakaman milik Pemkot Jogja, yaitu Pracimalaya, Sasanalaya, Sarilaya, dan Utaralaya, yang keempatnya sudah penuh.

Sementara itu, Unit Pelaksana Teknis Daerah Taman Pemakaman Umum (UPTD TPU) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kabupaten Sleman mendata 2.056 jenazah yang telah dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Seyegan dan Madurejo Prambanan sejak awal dibuka hingga 19 Agustus 2025.

TPU Seyegan beroperasi sejak Juni 2008 dengan menempati lahan seluas 5,1 hektare ber-

kapasitas 5.000 satuan ruang makam (SRM). TPU Madurejo Prambanan mulai dioperasikan awal 2016 dengan menempati lahan seluas 7,1 hektare berkapasitas 5.000 SRM.

Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Taman Pemakaman Umum DPUPKP Sleman, Retno Handayani, mengatakan TPU Seyegan dibagi menjadi empat bagian yaitu pemakaman umum dengan 967 jenazah, pemakaman orang telantar 76 jenazah, pemakaman tumpang 37 jenazah, dan pemakaman korban letusan Gunung Merapi 124 jenazah. Lalu, TPU Madurejo dibagi menjadi tiga bagian yaitu pemakaman umum 623 jenazah, pemakaman tumpang delapan jenazah, dan pemakaman Covid-19 ada 221 jenazah.

Kepala Bidang Perumahan DPUPKP Sleman, Suwarsono, mengatakan Pemkab Sleman berkomitmen memberi fasilitas kepada warga Sleman terkait dengan lahan pemakaman. Komitmen ini mewujud dengan keberadaan UPTD TPU.

Menurut dia, konflik pendatang dengan warga lokal dapat terjadi akibat pemakaman. "Kami juga sedang membuat kajian potensi lahan untuk TPU baru. Rencananya di Sleman sisi utara," kata Suwarsono.

Belum Punya TPU

Sementara itu, Pemkab Gunungkidul sudah memiliki regulasi tentang pemakaman. Hal ini tertuang dalam Perda No.9/2024 tentang Penyelenggaraan Pemakaman, meski demikian, hingga sekarang belum ada TPU yang berstatus milik Pemkab Gunungkidul.

Kondisi yang sama juga terjadi di Kulonprogo. Pemkab Kulonprogo sampai sekarang belum memiliki TPU. Padahal, sudah ada Perda No.6/2018 tentang Penyelenggaraan Pemakaman.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kulonprogo, Didik Wijanarko, mengatakan jawatannya baru melakukan *feasibility study* untuk pengadaan TPU. *(Khairul Ma'arif)*

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005